

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak, pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela, jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,
2. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta dalam prosedur pencatatan pendapatan daerah khususnya pajak daerah sudah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yaitu menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD untuk membukukan pajak yang diterimanya. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam buku tersebut antara lain berupa Surat Tanda Setoran Pajak Daerah dan Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah, Pembukuan penerimaan pendapatan dan pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD dimulai dari saat bendahara peneriman

PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah.

3. Nilai efektivitas pajak daerah DKI Jakarta selama 5 tahun dari tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2018 tingkat efektivitasnya dibawah 100% dikarenakan penerimaan pajak tidak sesuai target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 94,94% . Tingkat efektivitas pada tahun 2014 sebesar 80,53% dan tahun 2015 meningkat menjadi 86,44%. Pada tahun 2016 efektivitasnya meningkat kembali menjadi 91,97% dan pada tahun 2017 efektivitasnya juga kembali meningkat menjadi 94,94%. Sedangkan pada tahun 2018 tingkat efektivitasnya menurun menjadi 93,81%. Rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah DKI Jakarta sebesar 89,54% dimana masuk dalam kategori cukup efektif.

4. Perhitungan proyeksi atau peramalan penerimaan masing-masing Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta selama tahun ke depan 2019 ini bervariasi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami kenaikan sebesar Rp 982.718.417.308, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mengalami penurunan Rp 208.328.170.106, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) mengalami penurunan sebesar Rp 44.324.042.400, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (PAT) mengalami kenaikan sebesar Rp 475.506.622, Pajak Hotel mengalami kenaikan sebesar Rp 36.442.596.251, Pajak Restoran mengalami kenaikan sebesar Rp 295.016.436.483, Pajak Hiburan mengalami kenaikan sebesar Rp 103.560.405.989, Pajak Rekalme mengalami kenaikan sebesar Rp

51.649.373.054, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) mengalami penurunan sebesar Rp 123.387.453.140, Pajak Rokok mengalami penurunan sebesar Rp 9.981.693.628, Pajak Parkir mengalami kenaikan sebesar Rp 23.060.251.744, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami kenaikan sebesar Rp 1.172.071.000.100 ini merupakan kenaikan tertinggi dibanding pajak daerah lainnya, dan terakhir Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami kenaikan sebesar Rp 495.351.665.959. Dengan ini menunjukkan besarnya potensi Pajak Daerah yang bisa dicapai di masa depan apabila dapat dikelola dengan baik dan tepat oleh Pemerintah DKI Jakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis penerimaan dan realisasi pajak daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Berdasarkan uraian kesimpulan dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota DKI Jakarta khususnya adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Agar realisasi pajak daerah bisa lebih efisien, maka Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu mengkaji antara sektor yang produktif dengan sektor yang kurang produktif, kemudian pemerintah daerah harus memotong anggaran di sektor yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor yang lebih produktif.

- b. Agar pajak yang diterima dapat efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah pemahaman tentang konsep pendapatan pajak, dengan memahami konsep pendapatan pajak maka perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah menjadi lebih mudah dilakukan.
- c. Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta perlu menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang akuntansi dan keuangan sehingga penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini dapat efektif dan efisien

2. Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian tentang analisis penerimaan dan realisasi pajak daerah DKI Jakarta dapat dijadikan sebagai sumber referensi mengenai potensi pajak daerah dan dapat membandingkan pajak daerah lainnya.
- b. Lebih mendalami dalam menganalisis pajak daerah pada menggunakan rasio atau teknis analisis yang berbeda sehingga adanya peningkatan data yang lebih akurat dari hasil penelitian.
- c. Penelitian selanjutnya harus mempersiapkan data yang akan diperlukan saat melakukan observasi agar efektif dan efisien saat melakukan penelitian data